

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang mempelajari isu kesejahteraan serta upaya dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti material, spritual, dan sosial hingga layak melakukan segala sesuatu dengan rasa yang sejahtera. Dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Adapun perkembangan kesejahteraan sosial dimasa lampau menurut Bossard:1982;

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak masa masyarakat primitif sekalipun dalam bentuk tolong-menolong untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya. Secara historis, kesejahteraan sosial telah mengakar lama dalam tradisi China, India, Mesir Kuno, Yunani, dan Yahudi (Bossard, 1982 dalam Fahrudin, 2018).

Dari pernyataan diatas dapat diartikah bahwa kesejahteraan sosial telah ada sejak masa lampau dimana kegiatan usaha kesejahteraan sosial melekat pada masa kuno melalui tindakan tolong menolong dan dalam mengatasi masalah yang ada di sekitarnya. Kesejahteraan sosial merupakan tindakan yang telah mengakar pada manusia sejak masa lampau.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya suatu kebutuhan dasar di kehidupan sehari-hari dan terhindar dari kesusahan. keadaan sejahtera mencakup

kondisi dimana kehidupan terpenuhi sejata jasmaniah, rohaniah, dan sosialnya. Jika seseorang dapat menjalankam kehidupan dan kebutuhannya secara mandiri dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik, maka dapat dikatakan orang tersebut berada dalam kondisi sejahtera. Namun jika salah satu diantaranua tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan sejahtera, sehingga akan timbul masalahmasalah sosial, dalam hal ini tentu ada upaya untuk mencapai sejahtera. (Friedlander:1980 dalam fahrudin), menyatakan pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander 1980, dalam Fahrudin, 2012:9).

Friedlander:1980 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem pelayanan yang dibentuk untuk membantu setiap individu, kelompok, maupun komunitas yang mengalami masalah atau kesusahan sehingga mampu mencapai kebutuhan dasar di kehidupan sehari-harinya, dan menjadi makhluk yang sepenuhnya dapat selaras dengan kehidupannya.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang jelas untuk mencapai terwujudnya suatu kondisi sejahtera yang diharapkan menurut Fahrudin (2012:10) sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, panagan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misal dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan tarah hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial bertujuan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik dalam segi rohani maupu jasmaninya serta dapat mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Tujuan lainnya adalah mampu mengembalikan dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat menjadi manusia yang layak.

2.1.3. Fungsi – fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai bentuk penanganan tekanantekanan yang diakibatkan masalah keberfungsian sosial, juga bentuk tindakan menghindari konsekuensi sosial yang dapat berpengaruh pada lingkungan sosial sehingga mengakibatkan kondisi yang buruk. Fungsi kesejahteraan sosial ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dibawah ini madalah fungsifungsi kesejahteraan sosial menurut Friendlander & Apte dikutip dari Fahrudin (2012:12):

- 1) Fungsi pencegahan (*preventif*)
- 2) Fungsi penyembuhan (*curative*)
- 3) Fungsi pengembangan (*development*)
- 4) Fungsi penunjang (*supportive*) (Fahrudin,2018)

Fungsi dari kesejahteraan sosial mengandung pencegahan, penyembuha, pengembangan, penunjang bagi setiap masyarakat terutama yang tidak mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Fungsi ini memiliki peran terutama penanganan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kesulitan dalam kehidupan

seharijarinya. Berikut beberapa penjelasan terhadap fungsi-fungsi kesejahteraan sosial diatas menurut Friendlander & Apte dikutip dari Fahrudin (2012:12)

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola yang baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi sosial kembali dalam masyarakat. Fungsi ini juga mencakup fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*).

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

Fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Pada

fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah baru. Fungsi penyembuhan ditujukan untuk pemulihan bagi setiap orang pada masalah kondisi pribadi agar berfungsi kembali. Pada fungsi pengembangan ditujukan untuk memberikan atau membantu pada proses pengembangan sumber daya sosial masyarakat. Pada fungsi penunjang untuk membantu mencapai sektor pelayanan sosial lainnya. Friendlander & Apte dikutip dari Fahrudin (2012:12)

2.1.4. Bidang -bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam pelayanan dan proses pertolongan yang diberikan terhadap masyarakat dalam masalah yang tengah dihadapi, terdapat beberapa bidang yang menjadi ruang lingkup kesejahteraan sosial. Berikut adalah bidang-bidang yang menjadi lingkup pelayanan kesejahteraan sosial:

- 1) Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
- 2) Kesejahteraan Sosial Remaja dan Generasi Muda
- 3) Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- 4) Pelayanan Kesejahteraan Sosial Umum
- 5) Pelayanan Rekreasional
- 6) Pelayanan Sosial Koreksional
- 7) Pelayanan Kesehatan Mental
- 8) Pelayanan Sosial Medis
- 9) Pelayanan Sosial bagi Penyandang Cacat
- 10) Pelayanan Sosial bagi Perempuan
- 11) Pelayanan Sosial Perumahan dan Lingkungan

2.2. Konsep pekerjaan sosial

Profesi pekerja sosial belum secara luas dikenal oleh masyarakat umum. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pekerja sosial bukan merupakan profesi professional, melainkan kegiatan sosial seperti pemberi santunan bagi rakyat miskin, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Pekerja sosial professional adalah sebuah profesi yang didasarkan atas ilmu pendidikan dan mengikuti serangkaian pendidikan di dunia pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Menurut studi kurikulum oleh *The council on Social Work Education tahun 1959* dinyatakan bahwa:

Social work seeks to enhances the social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationship which constitute their interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity of individual and social resources, and prevention of social dysfunction. (Farley et al.,2003 dalam Fahrudin, 2018)

Penjelasan definisi diatas adalah pekerja sosial melakukan usaha dalam meningkatkan keberfungsian sosial individu secara mandiri atau kelompok dengan kegiatan yang diutamakan pada hubungan antar sosial manusia dengan lingkungannya. Setiap kegiatan dibedakan menjadi tiga yaitu, pemulihan gangguan kapasitas sumber daya individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas professional yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya untuk mewujudkan keberfungsian sosial dan mencapai derajat kehidupan yang sejahtera. Pekerjaan sosial adalah profesi kemanusiaan yang mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat. Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip

Suharto (2009:1) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi tersebut menyatakan bahwa praktik pekerjaan sosial yang dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ahli pekerja sosial maka disebut sebagai aktivitas professional. Tujuannya dari pekerjaan sosial adalah fokus pada keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera. Pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh the Council on Social Work Education dalam Fahrudin (2012:59) dinyatakan bahwa:

Social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationships which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction.

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Kegiatan professional yang dilakukan pekerja sosial berdasarkan penerapan praktik professional yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga mampu menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan tersebut. Pekerja sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam

Fahrudin (2012:60) adalah:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors”.

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluargakeluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini. Pekerja sosial adalah aktifitas profesional untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat dalam pemecahan masalah sosial yang kaitannya untuk perubahan sosial. Dimana pekerja sosial sebagai profesinya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan pekerjaan sosial, seperti yang dinyatakan dalam definisi pekerjaan sosial. Dalam Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli

tahun 2000, *International Federation of Social Workers (IFSW)* (Tan dan Envall, 2000:5 dalam Suharto, 2009) mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut:

The social work profession promotes problem solving relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (International Federation of Social Workers (IFSW))

Profesi Pekerjaan Sosial mendorong pemecahan masalah kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, Pekerjaan Sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial (*International Federation of Social Workers (IFSW)*).

2.2.1. Unsur – unsur Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya yaitu intervensi sosial pada individu, kelompok, dan masyarakat memiliki tiga pilar utama yaitu: *body of knowledge*, *body of skills*, dan *code of ethics*. Ketiga pilar tersebut menjelaskan dimana unsur pekerja sosial dilakukan berdasarkan pengetahuan, menguasai keterampilan pada saat melakukan praktik pekerjaan sosial, dan selalu berpedoman kepada nilai kode etik pekerjaan sosial. Fahrudin, 2018 menjelaskan unsur yang harus ada dalam praktik pekerjaan sosial sebagai berikut:

Praktik pekerja sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai serta etika, metode dan Teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, maka dalam diri calon pekerja sosial ini akan terbentuk kemampuan melakukan analisis (dilandasi pengetahuan), sikap (dilandasi oleh metode dan Teknik yang telah dikuasai). Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah

dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat (Fahrudin, 2018)

2.2.2. Misi, maksud, dan Tujuan Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial berusaha untuk kebertungsihan orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (Zastrow, 2008).

2.2.3. Metode Pekerjaan Sosial

Dalam melakukan praktiknya, pekerja sosial dikenal memiliki tiga pendekatan utama yaitu pendekatan mikro yaitu pendekatan terhadap individu dan keluarga, mezzo merupakan pendekatan pada kelompok dan komunitas, dan makro yaitu pendekatan pada masyarakat. Berikut metode yang ada dalam pekerjaan sosial menurut Fahrudin, 2018 sebagai berikut:

...secara tradisional pekerjaan sosial dikatakan mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu. Metode pokok tersebut adalah *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community*

development. Sedangkan metode pembantunya adalah *social work administration, social action, dan social work research* (Fahrudin, 2018).

Metode terdiri atas pelaksanaan peranan interventive yang mengikuti prosedur yang melaksanakan tugas-tugas seperti engagement, perrumusan kontrak, assessment, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi. Intervensi adalah tindakan menyediakan sumber-sumber, sekecil suatu teknik tertentu atau sebesar penyediaan sosial (*social provision*), seperti membuat interpretasi, atau membuat rujukan lembaga lain, atau pengembangan suatu program pelayanan sosial. Prosedur menunjukkan aliran dan kumpulan tindakan interventive yang berorientasi tugas yang berpolakan peranan. Strategi adalah kumpulan prosedur yang melibatkan garis tindakan berencana dan penggunaan sumber-sumber, seperti strategi pendidikan yang memperoleh dukungan mereka untuk usulan legislative (Siporin, 1975 dalam Fahrudin,2018).

2.2.4. Peran-peran Pekerja Sosial

Aspek penting dalam pekerjaan sosial terutama pada saat berlangsungnya kegiatan intervensi dan assessment sosial adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam menangani suatu masalah baik individu, kelompok atau masyarakat. Ada tujuh peran yang dijalankan oleh pekerja sosial, dimana ketujuh peran yang dijalankan adalah sebagai: Pemercepat perubahan (*enabler*), perantara (*broker*), pendidik (*educator*), tenaga ahli (*expert*), perencana sosial (*social planner*), pembela atau advokat (*advocate*), dan aktivis (*activist*) (Adi, 2008 dalam Iskandar, 2017).

1. *Enabler*, membantu masyarakat dalam tiga aspek sekaligus, yakni: agar masyarakat mampu mengartikulasikan kebutuhan sosialnya; agar masyarakat mampu mengidentifikasi masalah sosial yang sedang dihadapi; serta agar masyarakat mampu mengembangkan kapasistas dirinya sehingga dapat menangani masalah tersebut secara

efektif (Adi, 2008 dalam Iskandar, 2017).

2. *Broker*, perantara dalam proses intervensi sosial. Berkaitan erat dengan upaya menghubungkan individu dan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan layanan masyarakat (*community service*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat (Adi, 2008 dalam Iskandar, 2017).
3. *Educator*, seorang pekerja sosial diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta pesannya mudah ditangkap yang menjadi sasaran perubahan. Pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan (Adi, 2008 dalam Iskandar, 2017).
4. *Expert*, pekerja sosial memberi masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai situasi. Seorang tenaga ahli diharapkan dapat memberikan usulan mengenai bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan dalam suatu organisasi tertentu dalam menangani masalah lingkungan, memilih kelompokkelompok mana yang harus mewakili, atau memberikan masukan mengenai isu apa yang pantas dikembangkan dalam suatu komunitas atau organisasi tertentu (Iskandar, 2017).
5. Perencana sosial, pekerja sosial harus mengumpulkan banyak data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas maupun kelompok masyarakat, ia menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam menangani berbagai masalah tersebut. Setelah itu, perencanaan sosial mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, mencoba mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan consensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan dalam pengembangan masyarakat tersebut (Iskandar, 2017).
6. Advokat, berperan sebagai pelindung hukum. Pekerja sosial membantu masyarakat atau klien dalam memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan, sumber

daya, perlindungan dan pendampingan dalam kasus pelanggaran hukum serta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk mengubah atau membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pekerja sosial menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layanan yang berkaitan dengan advokasi.

7. Aktivistis, pekerja sosial selaku pembela yang mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar seringkali tujuannya adalah mengalihkan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang beruntung. Seorang aktivis biasanya mencoba menstimulasi kelompokkelompok yang kurang beruntung tersebut untuk mengorganisasikan diri dan melakukan tindakan perlawanan struktur kekuasaan (Adi, 2008 dalam Iskandar, 2017)

2.3. Konsep Keberfungsian Sosial

Tujuan utama dari pekerjaan sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika mereka berfungsi sosialnya, maka mereka bisa melakukan sesuatu hal untuk 37 mengupayakan kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang digunakan pekerja sosial pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) klien yang dibantunya.

Siporin dalam Fahrudin (2011:156) menyatakan bahwa: “*social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities and so on) behave in order to carry out their life task and meet their needs*”. Keberfungsian sosial merujuk pada cara-cara individu-individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi

kebutuhannya. Oleh karena itu, keberfungsian sosial orang berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya, maka keberfungsian sosial dapat pula diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan atau yang seyogianya ditampilkan oleh setiap orang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial.

Berdasarkan uraian definisi di atas, menurut Dwi Heru Sukoco (1991), keberfungsian sosial dapat dipandang dari berbagai segi yang dikutip dari Fahrudin (2011:157) yaitu:

- a. Keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan melaksanakan peranan sosial, yaitu sebagai penampilan pelaksanaan peranan yang diharapkan sebagai anggota suatu kolektifitas.
- b. Keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu mengacu kepada cara-cara yang digunakan oleh individu maupun kolektivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- c. Keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialaminya.

Keberfungsian sosial menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam dari Suharto (2009: 5) adalah: “Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya”. Pekerjaan sosial berusaha untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Setiap orang memiliki peranan sosial yang menjadi kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status perannya.

Barlett dalam Fahrudin (2012:62) menyatakan bahwa: “Keberfungsian sosial

merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”. Artinya seseorang dikatakan berfungsi sosialnya apabila dapat mengatasi dan menjalankan tuntutan sesuai peran sosialnya di lingkungannya yang merupakan sebagai bagian tugas-tugas kehidupannya.

Siporin dalam Fahrudin (2012:62) menyatakan bahwa: “Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas-seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya-berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa seseorang dikatakan berfungsi sosialnya jika ia mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan kehidupan sesuai peran sosialnya di lingkungan sesuai tuntutan peranannya.

Peranan sosial dimiliki oleh setiap individu dalam mempertahankan kehidupannya, maka setiap orang akan berusaha mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-caranya serta menjalankan tugas-tugas kehidupan agar terpenuhinya kehidupan yang sejahtera. Fahrudin (2012:63) menyatakan bahwa:

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

Hal tersebut menjelaskan bahwa tercapainya dan terpenuhi keberfungsian sosial seseorang akan mencapai titik keseimbangan hidup dengan terpenuhinya segala kebutuhan dan tuntutan hidup. Selain itu tidak hanya terpenuhinya kebutuhan, tetapi juga peranan sosialnya berjalan sesuai dengan tuntutan peran sosialnya di lingkungan masyarakat. Peranan di lingkungan sosial dengan kebutuhan saling terkait, karena relasi dengan individu, kelompok ataupun di masyarakat menjadi suatu kebutuhan dalam status sosial seseorang dalam hubungan timbal balik. Adanya relasi diantara orang yang saling

mempengaruhi akan membantu memenuhi tuntutan dalam peranan sosial.

2.4. Konsep Kebutuhan Dasar

Dalam hidup manusia di dunia diliputi oleh berbagai kebutuhan untuk membuat hidupnya berarti dan menjadikannya sejahtera. Kebutuhan tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada kebutuhan yang dapat di tunda untuk memenuhinya ada kebutuhan yang harus segera pemenuhannya. Kebutuhan yang perlu segera di penuhi pemenuhannya seringkali di sebut sebagai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang langsung mempengaruhi hidup matinya seseorang, sehingga perlu segera untuk dapat di penuhi kebutuhan terhadapnya. Kebutuhan dasar manusia itupun mempunyai corak yang berbeda-beda pula. Pada manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat sederhana, sudah barang tentu kehidupan dasarnya berbeda dengan manusia yang hidup dalam masyarakat yang sudah maju. Manusia yang hidup di kota berbeda corak kebutuhan dasarnya dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di desa-desa yang terpencil. Walaupun coraknya berbeda-beda, kebutuhan dasar manusia mempunyai ciri karakteristik yang sama. Oleh karena itu, menurut seorang ahli ilmu jiwa Amerika yang terkenal bernama Abraham Maslow, menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yang pemenuhannya perlu disusun secara berjenjang menurut prioritas kekuatannya. Dasar pemikiran teori kebutuhan Abraham Maslow adalah:

1. Bahwa kebutuhan manusia itu bertahap, dan membentuk suatu hirarki dari fisiologis rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri.
2. Bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang berkelanjutan.

3. Bahwa kebutuhan manusia saling tergantung dan saling melengkapi
4. Bahwa kebutuhan yang telah terpuaskan akan berhenti sebagai motivasi, dan digantikan oleh kebutuhan berikutnya.

Maslow berpendapat bahwa kebutuhan yang berada pada jenjang yang pertama perlu lebih dahulu dipenuhi sebelum seseorang meningkat memenuhi kebutuhan yang kedua selanjutnya akan menimbulkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sehingga kebutuhan dasar manusia tersusun seperti bentuk piramida. Adapun piramida kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut:



gambar 2.4. Kebutuhan Dasar manusia menurut Maslow

1. Kebutuhan Fisik (*Physiological needs*) Menurut Maslow, kebutuhan dasar yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik (*Physiologis need*). Kebutuhan fisik ini merupakan kebutuhan yang perlu segera dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan yang dimaksud dengan kebutuhan fisik adalah kebutuhan untuk makan, sandang, pemurumahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup jasmaninya.
2. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*). Kebutuhan dasar manusia yang kedua

adalah kebutuhan akan keamanan (*safety needs*) kebutuhan akan keamanan ini hanya akan menjadi kebutuhan dasar apabila kebutuhan pertama sudah di penuhi. Manusia memerlukan keamanan dalam hidupnya. Untuk keperluan tersebut dapat di wujudkan dengan menjadi pengikut orang yang di anggap kuat atau menjadi anggota perkumpulan bela diri. Ada banyak ragamnya cara orang untuk memenuhi kebutuhan keamanannya, yang dapat di telusuri dalam kehidupan masyarakat.

3. Kebutuhan sosial (*social needs*) Setelah kebutuhan tahap kedua ini di penuhi, barulah manusia memikirkan untuk memenuhi kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk bermasyarakat (*social needs*). Seseorang merasa perlu bergabung dengan orang – orang lain untuk mengembangkan kehidupannya. Mereka kemudian bersedia untuk taat pada aturan yang di sepakati bersama, adanya pembagian kerja dan sebagainya. Perkawinan di pandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Kebutuhan Pengakuan (*esteem needs*) Setelah kebutuhan tahap ketiga di penuhi, maka seseorang akan meningkat pada kebutuhan tahap ke empat, yaitu kebutuhan untuk di hormati (*Ego esteem*). Seseorang ingin di hormati oleh orang lain. Dan biasanya seseorang di hormati atau di hargai karena kedudukan atau kemampuannya di dalam masyarakatnya.
5. Kebutuhan aktualisdasi diri (*selfactualization needs*). Pada tahap akhir adalah kebutuhan untuk berbeda dengan orang lain dengan mengaktualisasi/menampakkan hal-hal yang ada pada dirinya. bagi seseorang pelukis dia menginginkan kesempatan untuk dapat melukiskan sesuai dengan

jiwanya. Begitupula bagi seseorang yang mempunyai kemampuan atau hal-hal lain yang dapat menjadikan dirinya berbeda dari pada orang lain, mempunyai kebutuhan untuk dapat mengekspresikan dirinya dalam cipta karya dan kursanya. Kebutuhan dasar manusia dapat juga di bedakan menjadi kebutuhan materi dan spiritual, kebutuhan material adalah kebutuhan terhadap barang-barang adalah kebutuhan yang menyangkut kebutuhan jiwa, seperti agama, ilmu pengetahuan.

Namun dikarenakan perbedaan keadaan sosial yang berakibat pada angka kemiskinan dan rendahnya pendidikan di beberapa wilayah, maka timbulah adanya sekelompok masyarakat yang tidak lagi mementingkan sebuah pernaungan yang representatif, eksklusif atau bahkan mewah guna memenuhi segala kebutuhannya. Kelompok inilah yang lebih memikirkan kebutuhan primer sebagai kepentingannya utamanya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh David Lester terkait teori Abraham Maslow, hasil pengukuran yang diperoleh melalui skor nilai dan skala likert membuktikan bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang memiliki nilai paling menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan dasar setiap individu diantara hirarki kebutuhan lainnya. (Lester, 2017: 15-17)

2.5. Konsep Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto (2007:89) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya.

Menurut Soekanto (2001:237) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan. Kondisi ekonomi berperan penting dalam pendidikan seorang anak.

Menurut Gerungan (2009: 196), peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan anak memegang satu posisi yang sangat penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya jelas lebih luas, maka ia akan mendapat kesempatan yang lebih luas juga untuk mengembangkan kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan tanpa adanya sarana dan prasarana itu.

Dapat ditarik kesimpulan kondisi sosial ekonomi yaitu suatu posisi, kedudukan, jabatan, kepemilikan yang dimiliki seorang individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan aset rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga dan pekerjaan yang dimiliki yang akan sangat mempengaruhi status sosial seseorang, kelompok ataupun keluarga di lingkungan masyarakatnya.

a) Faktor-Faktor Penentu Sosial Ekonomi

Faktor-faktor yang menjadi penentu sosial ekonomi dimasyarakat diantaranya adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan kekayaan, dan jenis pekerjaan.

1. Tingkat Pendidikan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, pendidikan bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan 38 kebangsaan.” Melihat dengan tujuan yang ada di Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 maka pendidikan diselenggarakan dalam jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

2. Tingkat Pendapatan adalah jumlah semua hasil suatu pekerjaan yang diterima oleh orang yang bekerja yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang.
3. Kepemilikan Kekayaan Kepemilikan kekayaan merupakan kekayaan yang berupa barang-barang yang memiliki manfaat guna menunjang kehidupan ekonomi. Menurut Manginsih, pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua guna untuk memenuhi nafkah. Pekerjaan yang dilakukan berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan perbedaan tingkat penghasilan.
4. Jenis Pekerjaan Pekerjaan menjadi penentu dari status sosial ekonomi karena dengan melakukan pekerjaan kebutuhan dan keperluan dapat terpenuhi perekonomian dan kepuasan.
5. Perubahan Sosial Ekonomi Ada beberapa pendapat mengenai definisi perubahan sosial diantaranya adalah :
 - a) Menurut Mac Iver perubahan sosial adalah sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap hubungan keseimbangan sosial.
 - b) Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial adalah segala perubahan

pada lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial termasuk didalamnya nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok dalam bermasyarakat.

- c) Menurut Nursid Kusumaatmaja perubahan sosial adalah proses sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat yang merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan.

Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Ekonomi adalah kebutuhan setiap manusia, sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, maksud dari ekonomi sumberdaya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Perubahan ekonomi terjadi apabila kehidupan secara ekonomi mengalami perubahan.

Kegiatan ekonomi seseorang akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. diantara perubahan tersebut adalah jenis pekerjaan, dan gaji yang berbeda sehingga membawa perbedaan tentang perubahan ekonomi. Misalnya pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi akan membawakan kehidupan yang lebih baik lagi dalam ekonomi. Sehingga perubahan sosial ekonomi adalah perubahan bermasyarakat yang dikarenakan unsur dari ekonomi yang mengalami perubahan.

b) Peningkatan Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan hubungan dinamis dalam masyarakat yang berkaitan dengan matapencaharian dan perolehan pendapatan. Perekonomian masyarakat dapat dilihat adanya gejala-gejala upaya penentuan kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat disekitar.

2.5.1. Konsep Kebutuhan Sosial

Hierarki Kebutuhan Maslow adalah teori psikologis yang mencoba menjelaskan perilaku manusia. Menurut teori ini, tindakan manusia tergantung pada pencapaian tujuan. Teori Maslow biasanya ditampilkan dalam piramida dengan lima tingkat. Kebutuhan sosial ditempatkan pada tingkat ketiga. Kebutuhan sosial dinilai kurang penting daripada kebutuhan keamanan dan kebutuhan fisiologis tetapi di bawah kebutuhan harga diri dan realisasi diri.

Kebutuhan sosial juga dianggap sebagai kebutuhan kekurangan atau sesuatu yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Menurut teori Maslow, kebutuhan sosial penting karena membentuk hubungan emosional sangat penting untuk mencegah kecemasan, depresi dan kesepian. Maslow juga berpendapat bahwa manusia membalas emosi dengan tujuan memenuhi kebutuhan sosial mereka sendiri. Kebutuhan sosial dipenuhi dengan berbagai cara salah satunya: keluarga memenuhi kebutuhan sosial anak-anak, kemudian dalam kehidupan pasangan romantis, teman-teman dan rekan kerja lagi memenuhi keperluan sosial, bergabung dengan kelompok : seperti gereja atau tim atletik, juga memenuhi kebutuhan sosial. (Maslow A. H. (1943) *a theory of human motivation*)

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang menciptakan nilai sosial dan kesempatan bagi orang untuk memiliki peran aktif dan efektif dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting untuk perkembangan manusia dan kesejahteraan, dan mereka termasuk kebutuhan untuk cinta, persekutuan, persahabatan, dan kepemilikan. Kebutuhan sosial menginspirasi orang untuk berinteraksi satu sama lain dan menciptakan komunitas dan persahabatan. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi untuk jiwa yang sehat dan kehidupan yang damai, jika tidak, ketidakpuasan dan keputusasaan menetap untuk membuat hidup menyedihkan. Kebutuhan sosial juga dianggap sebagai kebutuhan kekurangan atau sesuatu yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Membangun hubungan emosional sangat penting untuk mencegah kekhawatiran emosi seperti depresi atau kecemasan.

Dalam pengaturan komunitas, kebutuhan sosial mencakup setidaknya satu dari empat dasar, yaitu berkomunikasi, terhubung, berkontribusi, dan menciptakan. Misalnya, persahabatan mencakup "komunikasikan" dan "hubungkan" di mana cinta romantis meliputi semua empat dasar. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang menciptakan nilai sosial dan kesempatan bagi orang untuk memiliki peran aktif dan efektif dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting untuk perkembangan manusia dan kesejahteraan, dan mereka termasuk kebutuhan untuk cinta, persekutuan, persahabatan, dan kepemilikan. Kebutuhan sosial menginspirasi orang untuk berinteraksi satu sama lain dan menciptakan komunitas dan persahabatan. Kebutuhan sosial juga dianggap sebagai kebutuhan kekurangan atau sesuatu yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. (Hasan Ayyıldız et

al., 2020)

2.5.2. Konsep Kebutuhan Ekonomi

Kebutuhan ekonomi mengacu pada hal-hal yang dibutuhkan orang untuk bertahan hidup dan berfungsi dalam masyarakat, seperti makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan didasarkan pada kebutuhan fisiologis, pribadi, atau sosio-ekonomi yang diperlukan bagi orang untuk berfungsi dan hidup. Kebutuhan ekonomi berbeda dari keinginan, yang adalah hal-hal yang orang ingin memiliki tetapi tidak diperlukan untuk bertahan hidup. Kedua kebutuhan dan keinginan harus dibeli dengan uang, dan kadang-kadang orang membingungkan keinginan dan kebutuhan mereka dan menghabiskan terlalu banyak uang mereka pada hal-hal yang mereka inginkan, meninggalkan mereka tanpa cukup uang untuk kebutuhan mereka.

Kebutuhan ekonomi adalah konsep penting dalam ekonomi, dan anggaran dapat membantu orang mencari tahu apa yang mereka mampu dan memastikan bahwa semua kebutuhan mereka dibeli sebelum keinginan mereka. Perlindungan akses ke perawatan kesehatan, dan pendidikan adalah contoh lain dari kebutuhan yang penting untuk mempertahankan standar hidup yang memadai. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang timbul dari tingkat pendapatan di bawah atau di bawah garis kemiskinan. (Ahmad Nasrudin, 2022)

Berikut adalah macam-macam kebutuhan menurut tingkatannya jika dilihat dari aspek ekonomi:

1. Kebutuhan primer

Kebutuhan primer merupakan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi untuk

mempertahankan hidup. Bagi manusia, kebutuhan ini bersifat urgen dan harus dimiliki manusia. Kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Tanpa makanan, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Tanpa tempat tinggal ataupun rumah, manusia akan hidup terlunta-lunta dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kelayakan hidup.

2. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang berhubungan dengan upaya menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan jenis ini tidak harus selalu dipenuhi, namun bisa diupayakan saat kebutuhan primer telah aman. Adapun contoh kebutuhan sekunder yaitu pendidikan, akses kesehatan, dan lain-lain.

3. Kebutuhan tersier

Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi untuk meningkatkan prestise, harga diri, atau gengsi. Hal-hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan tersier yaitu barang mewah, barang branded, perawatan eksklusif, dan lain-lain. Setiap orang dapat memenuhi kebutuhan ini dengan cara menyesuaikan kondisi keuangan. Jika ingin memenuhi kebutuhan tersier, tentu kebutuhan primer dan sekunder sudah harus aman atau terpenuhi dengan baik. (Endang Sriningsih 2020)

2.6. Konsep Sosial Ekonomi Disabilitas

Kebutuhan untuk berinteraksi dan mempertahankan hubungan dengan orang lain dikenal sebagai kebutuhan sosial. Para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, sehingga mereka harus berinteraksi dengan orang lain secara positif, termasuk di masyarakat umum, untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka.

Kehidupan sosial penyandang disabilitas mencakup meningkatkan kepercayaan diri, mendapatkan dukungan sosial, membangun jaringan sosial, dan menghindari stigma negatif. Hampir semua orang pernah mengalami masalah atau kesulitan. Namun, kesulitan dapat lebih sering muncul dan memengaruhi orang-orang dengan disabilitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa hambatan tidak hanya berasal dari pandangan WHO mendefinisikan hambatan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dalam lingkungan seseorang yang membatasi fungsi. Ini termasuk hal-hal seperti lingkungan fisik yang tidak dapat diakses, kurangnya teknologi pendukung yang relevan : seperti peralatan rehabilitasi, asisten, dan adaptif, layanan, sistem, dan kebijakan yang tidak ada yang menghalangi penyandang disabilitas.
2. Penghalang komunikasi: penyandang disabilitas fisik yang mempengaruhi pendengaran, berbicara, membaca, menulis, atau pemahaman menggunakan cara yang berbeda untuk berkomunikasi daripada orang non-disabilitas.
3. Penghalang fisik : Penghalang fisik adalah rintangan struktural di lingkungan alami atau buatan manusia yang mencegah atau memblokir mobilitas (bergerak di sekitar lingkungan) atau akses. Contoh penghalang fisik meliputi: Langkah-langkah dan pembatasan yang menghalangi seseorang dengan mobilitas terbatas dari memasuki bangunan atau menggunakan trotoar; peralatan mammografi yang mengharuskan wanita dengan gangguan mobilitas untuk berdiri; dan Kurangnya skala berat yang dapat menampung kursi roda atau orang lain yang mengalami kesulitan naik.

(*World Health Organization, International classification of functioning, disability and health*. Geneva:2001, WHO. p. 214.)

Untuk menjamin kemandirian dan stabilitas finansial, memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang dengan disabilitas sangat penting. Namun, orang-orang dengan disabilitas sering dipandang negatif, yang dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan peluang kerja dan sumber daya keuangan. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk membantu orang-orang dengan disabilitas memenuhi kebutuhan finansial mereka.

- 1) Tujuan pemrograman inklusif adalah untuk memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas dimasukkan ke dalam semua aspek program pembangunan, termasuk program pembangunan ekonomi. Metode ini melibatkan menemukan dan menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi mereka, menyediakan tempat tinggal yang layak, dan mempromosikan hak dan martabat orang-orang dengan disabilitas.
- 2) Dukungan Kerja: Program dukungan kerja dapat membantu orang dengan disabilitas menemukan dan mempertahankan pekerjaan. Program ini dapat menawarkan pelatihan pekerjaan, bantuan dalam pencarian dan penempatan pekerjaan, dan membantu pengusaha memahami kebutuhan orang dengan disabilitas. Mereka juga dapat membantu pengusaha memahami kebutuhan orang dengan disabilitas.
- 3) Bantuan keuangan: *Social Security Disability Insurance (SSDI)* Asuransi Invaliditas Jaminan Sosial dan *Supplemental Security Income (SSI)* Pendapatan Jaminan Tambahan adalah beberapa contoh program bantuan

keuangan yang dapat membantu orang-orang dengan disabilitas memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperoleh stabilitas finansial. Program ini juga dapat mencakup bentuk bantuan keuangan lainnya, seperti asuransi perumahan dan tanda makanan.

- 4) Teknologi Terjangkau: Teknologi yang mudah diakses dapat membantu orang dengan disabilitas mendapatkan pekerjaan dan sumber daya finansial. Ini dapat mencakup teknologi bantuan seperti perangkat lunak pengenalan suara dan pembaca layar, serta situs web dan aplikasi seluler yang dapat diakses.
- 5) Program kewirausahaan untuk penyandang disabilitas dapat menawarkan kesempatan bagi orang dengan disabilitas untuk memulai bisnis mereka sendiri dan mencapai kemandirian keuangan. Program ini dapat mencakup pelatihan, mentoring, dan dukungan keuangan.
- 6) Upaya penting untuk memastikan bahwa orang dengan disabilitas memiliki akses yang sama ke peluang kerja dan kesempatan finansial adalah advokasi. Advokasi dapat melibatkan bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk meningkatkan hak-hak dan inklusi penyandang disabilitas, serta bekerja sama dengan pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan praktik-praktik yang mencakup penyandang disabilitas.

Untuk menyimpulkan, memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang dengan disabilitas membutuhkan pendekatan yang mencakup berbagai aspek untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang mereka hadapi. Upaya penting yang dapat membantu orang-orang dengan disabilitas mencapai stabilitas keuangan dan

independensi adalah pemrograman yang mencakup stigmatisasi disabilitas, dukungan kerja, bantuan keuangan, akses teknologi, kewirausahaan, dan advokasi. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif untuk semua dengan bekerja sama untuk mempromosikan hak-hak dan inklusi penyandang disabilitas. *Reducing stigma and discrimination against children with disabilities* (UNICEF)

Di Indonesia, keamanan ekonomi dan inklusi sosial sangat sulit bagi orang-orang dengan disabilitas. orang-orang yang cacat di Indonesia memiliki prestasi pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih buruk, peluang ekonomi yang lebih sedikit, dan akses yang lebih sedikit ke layanan publik daripada mereka yang tidak cacat. Selain itu, hampir 9% penduduk Indonesia mengalami cacat tingkat moderat atau parah, dan mereka harus membayar biaya hidup yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki cacat. (Dyah Larasati et al., 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Orang Disabilitas memastikan hak orang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan standar hidup yang sesuai dengan manusia sesuai dengan kecacatan, pendidikan, dan kemampuan mereka. Namun, terlepas dari perlindungan hukum ini, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan terhadap keamanan ekonomi dan inklusi sosial. Misalnya, orang-orang dengan disabilitas di Indonesia mendapatkan 22% lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka yang terampil. Untuk mengatasi bahaya finansial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia, kebijakan perlindungan sosial yang inklusif diperlukan.

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan, tetapi orang-orang dengan disabilitas tidak mendapat manfaat yang sama dari kemajuan ini. Penyandang disabilitas sering dikucilkan dari masyarakat dan menghadapi diskriminasi yang signifikan dalam hal akses mereka ke layanan kesehatan dan layanan lainnya, pendidikan, dan peluang karir. (*Inclusion of people with disabilities in indonesia.*,2013)

Dibutuhkan kebijakan dan program yang lebih kuat untuk mendorong inklusi orang dengan disabilitas di Indonesia. Ini adalah beberapa solusi :

- Meningkatkan akses ke pendidikan: Orang-orang dengan disabilitas di Indonesia menerima pendidikan yang lebih sedikit daripada orang tanpa disabilitas. Kebijakan dan program yang memperluas akses ke pendidikan dapat membantu mengatasi masalah ini.
- Memfasilitasi pekerjaan yang mencakup disabilitas: penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Kebijakan dan program yang mendukung pekerjaan inklusif dapat membantu mengatasi masalah ini.
- Meningkatkan akses ke perawatan kesehatan : penyandang di Indonesia memiliki hasil kesehatan yang lebih buruk daripada non-disabilitas. Mengatasi masalah ini dapat dibantu oleh kebijakan dan program yang meningkatkan akses orang dengan disabilitas ke perawatan kesehatan.
- Meningkatkan akses ke perlindungan sosial: penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi masalah keuangan yang lebih besar daripada orang-orang non-

disabilitas. Kebijakan dan program yang meningkatkan akses ke perlindungan sosial bagi orang-orang cacat dapat membantu mengatasi masalah ini.

- Mengatasi Persepsi Negatif dan *Stereotype*: sikap negatif dan stereotip terhadap orang-orang dengan disabilitas dapat menyebabkan diskriminasi dan pengucilan penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mencapai keamanan ekonomi dan inklusi sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung inklusi penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. (*Inclusion of people with disabilities in indonesia.*,2013)

2.6.1. Konsep Penyandang Disabilitas Fisik

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu. Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

6. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang

disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
8. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari 43 masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
9. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
10. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan

mental.

11. Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2.6.2. Jenis disabilitas fisik

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan

tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara

- e) Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:
- f) Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
 - 1) kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
 - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa

disebut tunawicara.

- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada *organ motoric* yang berkaitan dengan bicara .

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- d. *Impairment*, yaitu kondisi tidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
- e. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- f. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment, disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.